



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

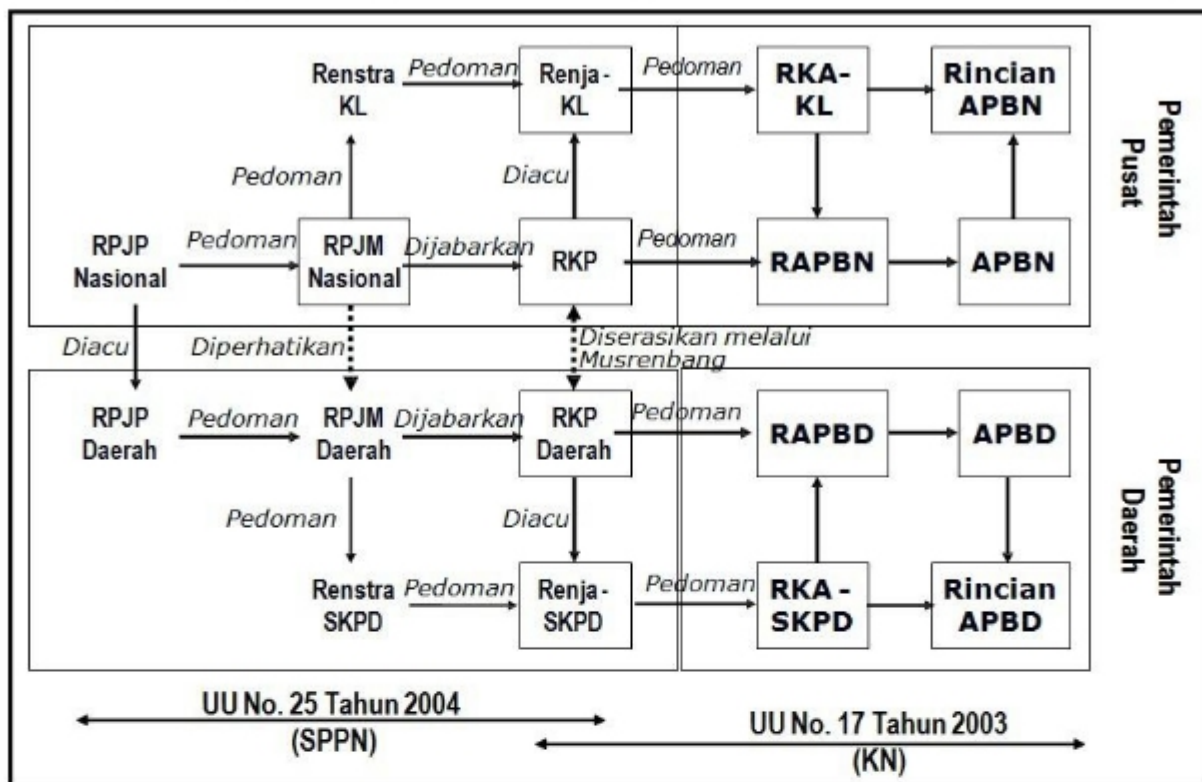
Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.

Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- Persiapan penyusunan,
- Penyusunan rancangan awal,
- Penyusunan rancangan,
- Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- Perumusan rancangan akhir, dan
- Penetapan.

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 disusun dengan berpedoman hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 50);

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
- 2) Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024,
2. Evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan
Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II (sd Mei)		III		IV										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Capaian Nilai AKIP	Angka	92	40,590,143,399	85	13,972,884,631	89	8,564,914,774	85.04	2,186,862,150	85.04	3,420,224,271	85.04	6,477,599,468	81.55	7,996,391,391	81,55	7,996,391,391	91,62	93.36%	81,55	21,969,276,022	91,62	54.12	Sekretariat
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	517,392,299	100	197,852,500	100	55,357,500	100	15,082,500	100	19,107,500	100	39,815,000	100	55,310,000	100	55,310,000	100	99.91	100	253,162,500	100	48.93	Sekretariat
		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Doku men	8	84,930,000	8	106,152,500						84,930,000						-			8	106,152,500	100	124.99	
				Dokumen perencanaan dan pelaporan	Doku men	4			-												-			4	-	100		
				Laporan Koordinasi, Peningkatan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja																	-			1	-			
		2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men	4	38,497,096	2	19,882,500	2	20,370,000	1	12,532,500	1	14,432,500	1	17,195,000	2	20,362,500	2	20,362,500	100	99.96	4	40,245,000	100	104.54	
		2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Doku men	7	393,965,203	12	71,817,500	12	34,987,500	3	2,550,000	5	4,675,000	9	22,620,000	12	34,947,500	12	34,947,500	100	99.89	24	106,765,000	343	27.10	
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	%	100	29,885,295,148	100	10,829,780,564	100	6,943,066,726	100		100	2,978,358,271	100	5,198,233,414	100	6,397,392,668	100	6,397,392,668	100	92.14	100	17,227,173,232	100	57.64	Sekretariat
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji ASN yang di bayarkan	Kali	14		14	4,948,344,655		6,783,596,726				4,948,344,655						6,252,237,668		92.17	14	11,200,582,323	100		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II (sd Mei)		III		IV										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan	Bulan	12		12	-														12	-	100			
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	49	29,384,495,148	47	5,732,835,909	47		47	1,878,123,855	47	2,921,858,271	47	5,091,670,914	47		47		100		94	5,732,835,909	192	19.51	Sub Bagian Program dan Keuangan
		2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	460,000,000	12	143,520,000	12	151,820,000	3	30,855,000	5	53,625,000	9	10,1265,000	12	137,520,000	12	137,520,000	100	90.58	24	281,040,000	200	61.10	Sub Bagian Program dan Keuangan
		2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen	18	40,800,000	18	5,080,000	18	7,650,000	4	1,387,500	6	2,875,000	10	5,297,500	18	7,635,000	18	7,635,000	100	99.80	36	12,715,000	200	31.16	Sub Bagian Program dan Keuangan
		2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Barang Milih Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	20,000,000	100	4,955,000	100	5,100,000	100	722,500	100	1,858,000	100	4,068,000	100	5,088,000	100	5,088,000	100	99.76	100	10,043,000	100	50.22	Sekretariat
		2 16 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan,dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	20,000,000	12	4,955,000	12	5,100,000	3	722,500	5	1,858,000	9	4,068,000	12	5,088,000	12	5,088,000	100	99.76	24	10,043,000	200	50.22	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2 16 01 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	%	100	16,000,000	100	5,090,000	0													0	5,090,000	0	31.81	Sekretariat	
		2 16 01 2.04 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	12	16,000,000	12	5,090,000	0													12	5,090,000	100	31.81	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
		2.16.01.2.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	350,000,000	100	33,745,000	100	93,955,000	100	5,100,000	100	7,225,000	100	89,660,000	100	93,952,500	100	93,952,500	100	100	100	127,697,500	100	36.49	Sekretariat
		2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dokumen	1	10,000,000	1							10,000,000						-		1		100	0.00		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
																				I	II (sd Mei)	III	IV					
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan																								
		2 16 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi,dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	12	340,000,000	12	33,745,000	12	93,955,000	3	5,100,000	5	7,225,000	9	89,660,000	12	93,952,500	12	93,952,500	100	100.00	24	127,697,500	200	37.56	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	%	100	4,072,726,886	100	1,314,927,397	100	486,906,786	100	97,761,788	100	153,371,138	100	375,630,363	100	482,485,776	100	482,485,776	100	99.09	100	1,797,413,173	100	44.13	Sekretariat
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan alat listrik	Jenis	13		6	10,100,000											-			6	10,100,000	46		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	13	63,455,640	13	12,503,800	13	12,530,760	13	3,402,550	13	5,463,900	13	10,242,850	13	12,524,650	13	12,524,650	100	99.95	26	25,028,450	200	39.44	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	10		10	279,671,500														10	279,671,500	100		Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
				Penyediaan Notebook	Unit	3		3															3		100			
				Penyediaan Peralatan Studio Audio	Jenis	10		10															10		100			
				Gordyn	Meter	22		22															22		100			
				Kursi Operator	Unit	2																	2		100			
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	2		-															2		100			
				Alat Pendingin	Unit	1		-															1		100			
				Alat Pencacah kertas	Unit	1		-															1		100			
				Peralatan Studio Video	Jenis	1		-															1		100			
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	1,065,454,528	10	150,942,000	3	85,300,000	3	37,362,000	5	37,362,000	6	75,962,000	3	80,962,000	3	80,962,000	100	94.91	13	231,904,000	163	21.77	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis	7		10	21,860,000														10	21,860,000	143			
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	215,303,100	7	23,537,000	7	23,884,680	7	9,887,100	7	13,131,950	7	20,381,450	7	23,883,600	7	23,883,600	100	100.00	14	47,420,600	200	22.03	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
																				I	II (sd Mei)	III	IV					
		2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	33	310,847,701	33	66,289,760	33	31,852,346	33	9,812,838	33	16,298,738	33	29,639,753	33	31,852,346	33	31,852,346	100	100.00	66	98,142,106	200	31.57	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	2		2	30,264,200															2	30,264,200	100		
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	224,433,487	2	38,597,335	2	16,329,500	2	2,979,100	2	4,232,860	2	11,170,860	2	16,329,230	2	16,329,230	100	100.00	4	54,926,565	200	24.47	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan	Jenis	3		3	3,884,000															3	3,884,000	100		
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jenis	3	30,157,135	3	2,939,000	3	5,400,000	3	1,170,000	3	1,950,000	3	3,570,000	3	5,390,000	3	5,390,000	100	99.81	6	8,329,000	200	27.62	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2 16 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	36,500,000	12	20,000,000	12	20,000,000	3	2,825,000	5	7,075,000	9	13,875,000	12	20,000,000	12	20,000,000	100	100.00	24	40,000,000	200	109.59	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Doku men	3		3	280,141,165															3	280,141,165	100		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	1,904,975,295	12	358,720,137	12	277,059,500	3	29,313,200	5	56,473,690	9	197,280,450	12	277,015,950	12	277,015,950	100	99.98	24	635,736,087	200	33.37	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2 16 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	12	21,600,000	12	5,277,500	12	5,100,000	3	1,010,000	5	1,933,000	9	4,058,000	12	5,078,000	12	5,078,000	100	99.57	24	10,355,500	200	47.94	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2 16 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksa naan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokume n	12	200,000,000	12	10,200,000	12	9,450,000	3		5	9,450,000	9	9,450,000	12	9,450,000	12	9,450,000	100	100.00	24	19,650,000	200	9.83	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	10,000,000	100	15,000,000															100	15,000,000	100	150.00	
		2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	1	10,000,000	1	15,000,000															1	15,000,000	100	150.00	
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa	%	100	2,384,227,637	100	611,874,022	100	305,387,062	100	58,066,157	100	98,227,312	100	232,264,901	100	292,236,257	100	292,236,257	100	95.69	100	904,110,279	100	37.92	Sekretariat

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II (sd Mei)		III		IV										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																								
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat	Doku men	1		1	9,095,000															1	9,095,000	100		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	159,518,682	12	10,229,500	12	7,250,000	3	2,260,000	5	3,520,000	9	6,040,000	12	7,250,000	12	7,250,000	100	100.00	24	17,479,500	200	10.96	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	144,000,000	12	28,952,710	12	36,000,000	3	6,937,197	5	11,511,558	9	20,751,672	12	27,632,946	12	27,632,946	100	76.76	24	56,585,656	200	39.30	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Dokume n	1		1	51,799,000															1	51,799,000	100		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	297,442,135	12	54,694,955	12	55,450,000	3	1,200,000	5	1,996,400	9	54,199,855	12	55,400,555	12	55,400,555	100	99.91	24	110,095,510	200	37.01	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dokume n	1		1	281,342,175															1	281,342,175	100		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dokume n	12	1,783,266,820	12	175,760,682	12	206,687,062	3	47,668,960	5	81,199,354	9	151,273,374	12	201,952,756	12	201,952,756	100	97.71	24	377,713,438	200	21.18	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	100	3,334,501,429	100	959,660,148	100	675,141,700	100	99,762,850	100	162,077,050	100	537,927,790	100	669,926,190	100	669,926,190	100	99.23	100	1,629,586,338	100	48.87	Sekretariat
		2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas	Dokume n	1		1	224,797,143															1	224,797,143	100		
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara	Unit	17	1,960,282,295	17	297,716,905	17	336,151,700	17	72,112,850	17	105,434,550	17	238,122,790	17	333,081,690	17	333,081,690	100	99.09	34	630,798,595	200	32.18	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II (sd Mei)		III		IV										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				dan dibayarkan Pajaknya																								
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor	Dokumen	1			122,709,450															1	122,709,450	100		
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	186	908,521,388	160	128,179,000	160	116,340,000	40	27,650,000	66	43,877,500	120	79,287,500	160	116,327,000	160	116,327,000	100	99.99	320	244,506,000	172	26.91	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung	1		1	73,707,650															1	73,707,650	100		
				Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Unit	1	465,697,746	1	112,550,000	1	222,650,000	0		0	12,765,000	1	220,517,500	1	220,517,500	1	220,517,500	100	99.04	2	333,067,500	200	71.52	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	%	74	8,187,592,098	99	4,766,700,056	72	2,383,578,350	99	420,779,860	99	679,316,360	99.10	1,398,500,760	72	2,369,190,260	72	2,369,190,260	100	99.40	72	7,135,890,316	97	87.15	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	%	100	8,187,592,098	100	4,766,700,056	100	2,383,578,350	100	420,779,860	100	679,316,360	100	1,398,500,760	100	2,369,190,260	100	2,369,190,260	100	99.40	100	7,135,890,316	100	87.15	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N	Penanganan aduan	92		92	395,193,200															92	395,193,200	100		
				Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul	Liputan	307		307																307		100		
				Laporan indeks kualitas pelayanan informasi public	Dokumen	1		1																1		100		
				Laporan analisis isu publik	Dokumen	12		12																12		100		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II (sd Mei)		III		IV										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				bulanan																								
				Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Doku men	12	1,953,825,956	12	448,841,650	12	410,675,000	3	85,525,000	5	138,575,000	9	270,749,600	12	408,658,700	12	408,658,700	100	99.51	24	857,500,350	200	43.89	Ketua Tim
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Konten infor masi	260		6582	556,774,240															6582	556,774,240	2,532		
				Jumlah Pembangunan Papan Reklame/Baliho	Unit	3													0					3		100		
				Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Doku men	12	3,977,109,239	12	1,388,844,026	12	974,715,250	3	78,319,860	5	177,668,860	9	528,121,460	12	970,500,860	12	970,500,860	100	99.57	24	2,359,344,886	200	59.32	Ketua Tim
		2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Doku men	12	300,078,174	12	412,254,500	12	71,774,900	3	12,605,000	5	22,292,500	9	52,512,200	12	68,574,700	12	68,574,700	100	95.54	24	480,829,200	200	160.23	Ketua Tim
		2.16 02 201 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan	Kelompok Informasi Masyara kat (KIM	90		52	437,010,700															52	437,010,700	58		
				Badan public yg memiliki PPID	Badan public	211		132																132		63		
				Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Komuni tas masya raka	75		34																34		45		
				Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa	Publi kasi kegiatan	40		55																55		138		
				Laporan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling	Doku men	11		11																11		100		
				Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media	Doku men	12	1,956,578,729	12	1,127,781,740	12	926,413,200	3	244,330,000	5	340,780,000	9	547,117,500	12	921,456,000	12	921,456,000	100	99.46	24	2,049,237,740	200	104.74	Ketua Tim

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II (sd Mei)		III		IV										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan																								
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	Angka	3	51,556,102,996	3.30	22,546,990,529	2.90	14,348,370,934	3.30	1,277,155,834	3.30	2,844,649,576	3.3	11,451,934,505	4	14,189,863,410	4	14,189,863,410	137.93 10345	98.90	4	36,736,853,939	133	71.26	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik
				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100		100		100		100		100		100		100		100	-	100		100	-	100		Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	%	100	37,309,237,599	100	13,484,548,994	100	3,001,746,834	100	212,055,010	100	631,687,677	100	2,411,120,455	100	2,947,845,976	100	2,947,845,976	100	98.20	100	16,432,394,970	100	44.04	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
				Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	domain/ sub domain			371		386		371		371		371		386		386	-	100		757	-	182		
		2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Perang kat Daerah (PD)	45		45	10,360,216,996															45	10,360,216,996	100		Ketua Tim
				Titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah	Titik	45		45																45		100		
				Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan	Sistem elektronik	100		80																80		80		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
				jaringan intra pemerintah																								
				Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Perangkat Daerah (PD)	45		45															45		100			
				Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Perangkat Daerah (PD)	45		45															45		100			
				Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD)	Jaringan	1		1															1		100			
				Pembangunan Infrastruktur Internet	Lokasi	7		7															7		100			
				Pengadaan Server HCI	Paket	1		1															1		100			
				Sewa layanan Google Workspace	Akun	280		280															280		100			
				Titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan	Titik layanan	233		233															233		100			
				Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	1	37,309,237,599	1	3,124,331,998	1	3,001,746,834	1	212,055,010	1	631,687,677	1	24,111,20,455	1	2,947,845,976	1	2,947,845,976	100	98.20	2	6,072,177,974	200	16.28	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	95	14,246,865,397	84	9,062,441,535	89	11,346,624,100	3,30	1,065,100,824	3,30	2,212,961,899	3,30	9,040,814,050	89	11,242,017,434	89	11,242,017,434	100	99.08	89	20,304,458,969	94	142.52	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik
		2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Unit	1	3,939,647,420	1	5,351,343,803	1	9,267,505,600	1	734,334,300	1	1,606,882,540	1	7,596,574,691	1	9,250,415,493	1	9,250,415,493	100	99.82	2	14,601,759,296	200	370.64	Ketua Tim
		2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Layanan	13		7	709,750,503														7	709,750,503	54		Ketua Tim	
				Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Perang kat Daerah (PD	45		45															45		100			
				Lembaga yang memiliki portal dan situs web	Lembaga	5		5															5		100			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
				yang sesuai standar																								
				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan	Unit	9	3,182,316,456	1	534,046,166	3	620,242,500	0	217,471,774	0	263,104,909	0	467,790,684	3	596,322,966	3	596,322,966	100	96.14	4	1,130,369,132	44	35.52	
		2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Layanan	9	1,487,927,806	1	262,193,910	1	242,380,000	0	50,646,250	0	88,521,250	0	1,691,18,750	1	217,018,750	1	217,018,750	100	89.54	2	479,212,660	22	32.21	Ketua Tim
		2 16 03 2.02 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Doku men	1	520,303,352	1	223,627,600	1	138,462,500	0	7,635,000	0	7,635,000	0	103,672,625	1	130,610,125	1	130,610,125	100	94.33	2	354,237,725	200	68.08	Ketua Tim
		2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Menara telekomunikasi yang terkendali	Menara teleko muni kasi	437		394	722,907,500															394	722,907,500	90		
				Wifi publik yang di Fasilitas	Titik	85		45	-															45		53		
				Peralatan Pemantauan Menara	Unit	1		1	-															1		100		
				Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Doku men	1	4,396,908,863	1	730,335,000	1	836,641,000	0	30,488,500	0	186,330,700	0	590,969,800	1	826,117,100	1	826,117,100	100	98.74	2	1,556,452,100	200	35.40	Ketua Tim
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan	14	218,614,000	14	278,919,500															14	278,919,500	100	127.59	
				Layanan SPBE	Layanan	10		7																7		70		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										8		9		10		11															
										I		II (sd Mei)		III		IV															
1	2		3	4	4a	5		6		7a		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				(layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik																											
				Perangkat daerah yang mengimplementasi kan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Perang kat Daerah (PD	45		45																45		100					
				Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sistem elektronik	71		77																77		108					
				Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City	Perang kat Daerah (PD	45		45																45		100					
				Aparatur Sipil Negara pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Aparatur Sipil Negara	58		28																28		48					
				Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Peraturan	14		11																11		79					
		2 16 03 2.02 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring,Evalua si dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Doku men	1	501,147,500	1	249,317,553	1	241,392,500	0	24525000	0	60,487,500	0	112,687,500	1	221,533,000	1	221,533,000	100	91.77	2	470,850,553	200	93.95				
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					0																							
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun	%	100	1,035,441,563	100	509,066,650	100	375,737,500	100	65,800,000	100	88,000,000	100	164,575,000	100	365,940,750	100	365,940,750	100	97.39	100	875,007,400	100	84.51	Bidang Tata Kelola e-Government, Aplikasi Informatika			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			PERSANDIAN																									
			PROGRAM PENYELENGGA RAAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	81	7,360,469,378	86.05	2,333,548,792	75	1,147,952,888	86.05	154,951,657	86.05	367,898,315	86.05	889,050,292	75	1,132,153,284	75	1,132,153,284	100	98.62	75	3,465,702,076	93	47.09	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan Pengamanan sinyal	%	25	4,764,463,387	100	1,483,325,761	100	678,780,332	100	88,828,203	100	196,629,305	100	56,5747,549	100	675,605,132	100	675,605,132	100	99.53	100	2,158,930,893	400	45.31	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
			Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	Sistem elektronik	159		129	510,249,932															129	510,249,932	81		
				Sistem elektronik/ asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Sistem elektronik	10		10	-															10		100		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Perangkat Daerah	45	4,764,463,387	45	973,075,829	45	678,780,332	45	88,828,203	45	196,629,305	45	565,747,549	45	675,605,132	45	675,605,132	100	99.53	90	1,648,680,961	200	34.60	Ketua Tim
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	%	84	2,596,005,991	72	850,223,031	72	469,172,556	72	66,123,454	72	171,269,010	72	323,302,743	72	456,548,152	72	456,548,152	100	97.31	72	1,306,771,183	86	50.34	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Titik	12		12	282,465,865															12	282,465,865	100		
				Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Perang kat Daerah	45	2,596,005,991	45	567,757,166	45	469,172,556	45	66,123,454	45	171,269,010	45	323,302,743	45	456,548,152	45	456,548,152	100	97.31	90	1,024,305,318	200	39.46	Ketua Tim
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					0																0		-		
			PROGRAM PENYELENGGARA	Cakupan pemenuhan	%	100	8,298,504,350	3.33	1,471,192,970	71.43	338,215,000	3.33	3,625,000	3.33	3,625,000	3.33	320,859,351	71.43	335,776,751	71	335,776,751	100	99.28	71	1,806,969,721	71	21.77	Bidang Infrastruktur

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
			AN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	sarana prasarana budaya berbasis digital																							Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian	
			Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	%	100	8,298,504,350	100	1,471,192,970	100	338,215,000	0	3,625,000	0	3,625,000	99.25	320,859,351	100	335,776,751	100	335,776,751	100	99.28	100	1,806,969,721	100	21.77	Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian
			Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek	6	8,298,504,350	2	1,471,192,970	4	338,215,000				3,625,000			4	335,776,751	4	335,776,751	100	99.28	6	1,806,969,721	100	21.77	Ketua Tim
				Dokumen perancangan Penanda QR Code Makam Raja Mataram Kotagede	Doku men	1		1																1		100		
				ILM MRM Kotagede dan Kerto Pleret	ILM	1		1																1		100		
				Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Makam Raja Kotagede	Aplikasi	1		1																1		100		
				Pembangunan sistem informasi melalui media Penanda QR Code di Makam Raja Mataram Kotagede	Penanda QR Code	1		1																1		100		
				Pemeliharaan Jaringan internet dan CCTV di Makam Imogiri	Jaringan	1		1																1		100		
				Pengadaan CCTV keamanan Makam Raja Mataram Kotagede	CCTV	1		1																1		100		
				Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Cagar Budaya Situs Kerto Pleret	Paket	1		1																1		100		
				Internet untuk Padukuhan	Padukuhan	24		24																24		100		
				Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	Aplikasi	2		2																2		100		
				Pemeliharaan CCTV monitoring	Paket	2		2																2		100		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan tahun 2024	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2022 dan 2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Perubahan)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
1	2		3	4	4a	5		6		7a		8		9		10		11		12=11		X = 12/7 x 100%		13 = 6 + 12		14= 3/5x100%		15
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II (sd Mei)		III		IV										
												K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				keamanan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede																								
				Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	Paket	2		2																2		100		
				Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	Paket	2		2																2		100		
				Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	Penanda	2		2																2		100		
				Pemeliharaan Jaringan Internet dan WiFi	Paket	1				1								1		1		100		1		100		
				Pemeliharaan CCTV di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Kotagede	Lokasi	2				2								2		2		100		2		100		
				Pembangunan Jaringan Internet dan Wifi Padukuhan	Padukuhan	6				6								6		6		100		6		100		
JUMLAH										27,158,769,446		4,109,174,501	377	7,403,713,522	377	20,702,519,376	411	26,389,315,846	411	26,389,315,846								

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No.	Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, Evaluasi atas Pelaporan Kinerja dan Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memperoleh nilai yang maksimal
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indikator kegiatan tercapai
	Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Indikator sub kegiatan tercapai

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	• Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik. • Koordinasi yang baik antara semua pihak pelaksana.
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Data yang akurat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja • Koordinasi yang baik antar unit kerja

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	• Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Data yang akurat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	• Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Data yang akurat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Data yang akurat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	• Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Data yang akurat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja • Koordinasi yang baik antar unit kerja • Didukung SIM Gaji yang lancar.
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	• Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Data yang akurat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	• Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Data yang akurat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja • Koordinasi yang baik antar unit kerja

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Perencanaan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan, sehingga dapat terealisasi dengan baik • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Data yang akurat dalam pelaksanaan evaluasi kinerja • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Pelayanan Informasi Publik	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
3	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	• Pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki kebijakan SPBE yang lengkap serta telah disahkan, kebijakan tersebut dilakukan review Dan evaluasi secara berkala. • Pada aspek Perencanaan Strategis SPBE, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan pengelolaan inovasi proses bisnis sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. • Aspek Teknologi Informasi Dan Komunikasi telah dilaksanakan melalui mekanisme rekomendasi teknis pada proses pembangunan aplikasi di seluruh perangkat daerah. Rekomendasi teknis dikeluarkan oleh perangkat daerah yang mengampu urusan Komunikasi Dan Informatika. Pemerintah Kabupaten Bantul juga telah membangun Government Service Bus (GSB) sebagai media integrasi aplikasi yang digunakan seluruh perangkat daerah, pemerintah pusat Dan pemerintah daerah DI Yogyakarta.. • Kolaborasi antar perangkat daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Bantul. Tim Koordinasi SPBE telah dibentuk, disahkan Dan seluruh anggota tim melaksanakan tugas masing-masing. Hal yang tidak kalah pentingnya yaitu komitmen pimpinan daerah dalam mengawal implementasi SPBE, salah satunya dibuktikan dengan penetapan indeks SPBE sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah. • Penerapan manajemen SPBE dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Dan pedoman yang berlaku. Dalam hal pemenuhan sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Bantul yang berlokasi di wilayah Pemerintah Daerah DI Yogyakarta sebagai kota pelajar yang memiliki banyak perguruan tinggi maka relatif mudah untuk memperoleh SDM berkompeten yang potensial mendukung SPBE. • Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan melalui review Dan evaluasi secara berkala terhadap aplikasi-aplikasi layanan yang digunakan, untuk mengetahui sejauh mana aplikasi-aplikasi tersebut berfungsi serta kemungkinan

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	- Jumlah instansi yang mendukung penyelenggaraan urusan statistik sebagai produsen data semakin bertambah, yaitu sejumlah 157 instansi sesuai SK Bupati Bantul No. 40 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia di Kabupaten Bantul Tahun 2024; - Terselenggaranya Forum Satu Data Indonesia oleh koordinator Forum SDI - Kolaborasi yang baik antar ketugasan dalam tim internal dinas - Dukungan prioritas pengembangan aplikasi portal data Bantul - Dukungan prioritas pengembangan aplikasi geoportal - Dukungan pengembangan integrasi antar sistem - Dukungan data center dengan server berteknologi tinggi
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Proses perencanaan yang efektif dan terukur - Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. - Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja - Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan - Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Proses perencanaan yang efektif dan terukur - Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. - Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja - Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan - Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Proses perencanaan yang efektif dan terukur - Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. - Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja - Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan - Koordinasi yang baik antar unit kerja
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	

No.	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	• Proses perencanaan yang efektif dan terukur • Data yang lengkap, akurat dan akuntabel dalam penunjang kinerja. • Komitmen yang tinggi dari jajaran pimpinan dalam evaluasi kinerja • Kesiapan dari personal pelaksana kegiatan • Koordinasi yang baik antar unit kerja

Sebagaimana faktor-faktor penyebab dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan

penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan Manajemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis.
- b. Menyusun KAK kegiatan agar pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan dapat terarah sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- c. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan ROPK yang telah dibuat sebelumnya. Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang sudah dituangkan dalam aplikasi E-SAKIP.
- d. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan kegiatan yang disertai dengan pengendalian dan evaluasi serta penyediaan data informasi kebutuhan perencanaan;
- e. Menyusun peta kebutuhan data berdasarkan bidang urusan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Indeks kualitas layanan informasi publik	Angka	83.81	84,25	84,38	84,5	
2	Nilai Indeks	Angka	6,94	7,036	7.30	7,5	

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pembangunan TIK						
3	Nilai Tata kelola SPBE	Angka	2.90	3.30	3,70	3,70	
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	83.81	84,25	84,38	84,50	84,75
2	Tingkat kematangan keamanan siber pemerintah digital	Indeks	n/a	n/a	n/a	n/a	1,6
3	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	n/a	n/a	3,25	3,25	3,27

Sesuai pencapaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa:

1. Tidak ada IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang tidak memenuhi target.
2. IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang dapat memenuhi target adalah:

a. Indeks kualitas layanan informasi publik

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
- 2) Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
- 3) Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
- 4) Meminta tanggapan, umpan balik (*feed back*) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari *wistle blower system*.
- 5) Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai diseminasi informasi dan penangkal hoax
- 6) Meningkatnya Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

b. Nilai Indeks Pembangunan TIK

IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Tercapainya target koneksi jaringan *backbone*.

- 2) Tersedianya Wifi publik untuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam mengakses Internet secara gratis.
 - 3) Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan.
 - 4) Pembangunan TIK Sarana Prasarana Keistimewaan Kawasan SRS di Kabupaten Bantul.
- c. Nilai Tata kelola SPBE
- IKU tersebut dapat memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi.
 - 2) Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT dari hasil pelatihan SDM pengelola aplikasi di perangkat daerah, Kapanewon dan Kalurahan.
 - 3) Tersusunnya regulasi sebagai dasar pelaksanaan pengembangan *e-Government* dan SPBE dengan penerbitan peraturan bupati terkait dengan pengembangan aplikasi, pengelolaan data center, pengembangan infrastruktur, pengamanan aplikasi dan informasi, melakukan revisi peraturan daerah tentang retribusi menara, serta perbup SPBE.
 - 4) Optimalisasi penyelenggaraan statistik sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten
 - 5) Optimalisasi penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah Kabupaten Bantul.
 - 6) Optimalisasi operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah Kabupaten Bantul.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2026 supaya seluruh IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika.
3. Meningkatkan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah Kabupaten Bantul dengan optimal.

4. Mengelola *e-government* di lingkup pemerintah Kabupaten Bantul dengan optimal.
5. Menyelenggarakan dan mengelola statistik sektoral di lingkup Kabupaten Bantul.
6. Meningkatkan Kualitas Layanan Statistik
7. Menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Kabupaten Bantul.
8. Menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah Kabupaten Bantul.
9. Membangun ekosistem kultural DIY berbasis digital.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Komunikasi Dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian serta urusan Kebudayaan melalui Dana Keistimewaan. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan	Kelemahan
Memiliki infrastruktur jaringan intranet mandiri guna mendukung pelayanan publik berbasis elektronik	Masih ada SDM bidang TI yang kualifikasi pendidikan tidak sesuai.
Memiliki Pusat Data (Data Center) terpusat dan sesuai standar ISO 27001	Kemampuan kompetensi teknis SDM bidang TIK masih perlu ditingkatkan
Memiliki PPID sampai dengan tingkat kalurahan.	Integrasi aplikasi baik aplikasi layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan belum optimal
Memiliki Kelompok Informasi Masyarakat untuk diseminasi informasi publik dan penangkal <i>hoax</i>	Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui aplikasi layanan publik milik Pemerintah Kabupaten Bantul
Penyelenggaraan satu data sudah baik	Implementasi SPBE masih perlu ditingkatkan
Penyelenggaraan persandian berjalan baik	Keterbatasan peralatan persandian yang mengakomodir perkembangan TIK yang semakin pesat.
Evaluasi SPBE memiliki predikat Sangat Baik dari penilaian Kemenpan RB	
Mempunyai simpul data yang baik	

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Memiliki Jaringan Fiber Optik sampai dengan Kalurahan	Semakin banyak netizen milenial yang semakin kritis
Komitmen Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.	Kompetensi pengelola PPID pembatu belum merata dan belum memahami dasar hukum Keterbukaan Informasi
Semua Perangkat Daerah/Unit Kerja sudah berkomitmen untuk pemanfaatan TIK dalam mendukung kerja.	Sebagian besar anggota KIM merupakan generasi tua
Sebagian besar masyarakat Bantul sudah memiliki kemampuan dibidang TIK.	Penyelenggaraan satu data di tingkat kalurahan masih terbatas
Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki jurusan bidang TI.	Untuk publikasi digital hanya efektif pada milenial, untuk generasi tua masih lebih efektif menggunakan media konvensional seperti radio dan televisi
Adanya kerjasama berbagi pakai infrastruktur TIK dengan Pemda DIY.	Pengetahuan masyarakat tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi rendah.
Usaha ekonomi masyarakat dengan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi mulai berkembang.	Permasalahan pengawasan dan pengendalian TIK semakin kompleks
Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat tinggi.	
Kepemilikan perangkat teknologi informasi semakin terjangkau oleh masyarakat.	Kesadaran perangkat daerah dalam pengisian data masih kurang
Adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi/Pusat terhadap implementasi SPBE dan <i>Smart City</i>	Masih ada PD/Unit Kerja yang diwajibkan untuk menggunakan aplikasi/SIM dari pusat
Teknologi Informasi Sebagai pemantik pengembangan wilayah.	Investasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi sangat mahal
Pengembangan dan Pemerataan akses data dan informasi diberbagai sektor.	Penggunaan aplikasi umum atau aplikasi dari pemerintah pusat yang belum stabil
Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk peningkatan UMKM	Perkembangan serangan Siber semakin canggih baik tools maupun medianya.
Koordinasi dan kolaborasi yang optimal seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE maupun Dewan Smart City Kabupaten Bantul	

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1) Urusan komunikasi dan Informatika:

- a. Perluasan Infrastruktur Jaringan TIK.
- b. Percepatan Transformasi Digital Layanan Publik.
- c. Peningkatan kualitas pengelolaan aplikasi informatika.
- d. Penyusunan dan reviu regulasi TIK.
- e. Peningkatan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah.
- f. Optimalisasi Penyelenggaraan PPID Kalurahan.
- g. Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat untuk diseminasi informasi publik dan penangkal *hoax*.
- h. Peningkatan literasi digital masyarakat.
- i. Penyebaran Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul melalui berbagai media.
- j. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Badan Publik.
- k. Pengelolaan aspirasi dan aduan masyarakat.
- l. Penyebaran informasi potensi daerah.
- m. Peningkatan kapasitas SDM bidang TIK.
- n. Fasilitasi dan koordinasi implementasi Bantul Smart City.
- o. Fasilitasi dan koordinasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- p. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di Masyarakat.
- q. Fasilitasi Wifi Publik melalui KIM.
- r. Fasilitasi Wifi Publik pada destinasi wisata.

2) Urusan Statistik:

- a. Peningkatan pengelolaan Satu Data Bantul.
- b. Pemanfaatan Big Data.
- c. Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Statistik, Geospasial dan Manajemen Data.
- d. Peningkatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN).

3) Urusan persandian:

- a. Peningkatan Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- b. Peningkatan kapasitas SDM teknis pengamanan informasi.
- c. Penyampaian informasi akan pentingnya kesadaran untuk mengamankan informasi.
- d. Penerapan standar nasional manajemen keamanan informasi.
- e. Penambahan alat untuk penunjang keamanan informasi dan persandian.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan analisis kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Bantul	Sasaran Program: Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Bantul	Sasaran Program : Tersebarluasnya informasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bantul			
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	73%	Rp 1.698.953.412			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	73%	Rp 1.025.137.000,00	
2.16.02.201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			
			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Rp 1.698.953.412			Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100	Rp 1.025.137.000,00	
16 02 201	Monitoring Opini dan	Kab.	Jumlah Dokumen Hasil	12	Rp 405.482.635	Monitoring Opini dan	Kab.	Jumlah Dokumen Hasil	12	Rp 257.400.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
02	Aspirasi Publik	Bantul	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dokumen		Aspirasi Publik	Bantul	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
2.16 02 201 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12 Dokumen	Rp 826.040.847	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Rp 597.587.000,00	
2.16 02 201 06	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12 Dokumen	Rp 74.032.703	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Rp 36.475.000,00	
2.16 02 201 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12 Dokumen	Rp 393.397.227	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	12	Rp 133.675.000,00	
			Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80				Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80		
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Bantul	Sasaran Program : Terwujudnya Trasnformasi digital layanan publik			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Bantul	Sasaran Program : Terwujudnya Trasnformasi digital layanan publik			
			Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	3	Rp10.592.259.576			Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE	3	Rp 17.148.993.560,00	
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%				Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100		
2 16 03 201	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	100%	Rp7.491.932.993			Persentase Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi	100	Rp 9.435.410.060,00	
			Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	386 domain/sub domain				Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan	386 domain/sub domain		
2 16 03 201 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	Rp 7.491.932.993	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1	Rp 9.435.410.060,00	
2 16 03 202	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Program : Meningkatnya Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			
			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	89%	Rp3.100.326.583			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	89%	Rp. 7.713.583.500,00	
2 16 03 202 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp983.250.000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	Rp 5.507.335.000,00	
2 16 03 202 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	Rp577.843.882	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab. Bantul	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3 Unit	Rp 649.950.000,00	
2 16 03 202 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Unit	Rp387.932.050	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kab. Bantul	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Unit	Rp 497.287.500,00	
2 16 03 202 09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Rp119.421.489	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	Rp 130.667.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Cerdas					Cerdas					
2 16 03 202 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Rp907.754.162	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1	Rp 698.348.500,00	
2 16 03 202 12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Rp124.125.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1	Rp 229.995.000,00	
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
2 20 02	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Bantul	Sasaran Program: Terselenggaranya data statistik sektoral di Kabupaten Bantul			2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Bantul	Sasaran Program : Terselenggaranya data statistik sektoral di Kabupaten Bantul			
			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	Rp228.765.626			Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	Rp 329.750.000,00	
2 20 02 201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul			
			Persentase data yang dapat berbagi pakai	98	Rp228.765.626			Persentase data yang dapat berbagi pakai	98	Rp 329.750.000,00	
2 20 02 201 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi	2	Rp125.398.438	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2	Rp 179.500.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Statistik Sektoral		Data Statistik Sektoral			Statistik Sektoral					
2 20 02 201 03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Bantul	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	190	Rp103.367.188	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab. Bantul	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	190	Rp 150.250.000,00	
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Bantul	Sasaran Program: Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Bantul	Sasaran Program: Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi			
			Tingkat keamanan informasi pemerintah	80	Rp1.301.129.621			Tingkat keamanan informasi pemerintah	80	Rp 1.384.949.436,00	
2 21 02 201	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul			
			Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	100	Rp841.117.201			Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal	100	Rp 985.491.220,00	
2 21 02 201 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	45	Rp841.117.201	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	45	Rp 985.491.220,00	
2 21 02 202	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Bantul			
			Persentase titik yang	84	Rp460.012.420			Persentase titik yang	84	Rp 399.458.216,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan					diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan			
2 21 02 202 01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	45	Rp460.012.420	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	45	Rp 399.458.216,00	
2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2 22 08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Terselenggaranya Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	Sasaran Program : Terselenggaranya Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan			
			Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	71,43	Rp2.033.223.500			Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital	71,43	Rp 2.453.096.000,00	
2 22 08 2.06	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul di kawasan SRS			Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pembangunan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan di Kabupaten Bantul di kawasan SRS			
			Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	100	Rp2.033.223.500			Capaian kinerja pembangunan sistem informasi	100	Rp 2.453.096.000,00	
2 22 08 2.06 02	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	4	Rp2.033.223.500	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Kab. Bantul	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	4	Rp 2.453.096.000,00	
			Sistem Informasi Penanda					Jumlah Ekosistem Kultural	3 Objek		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Keistimewaan					DIY Berbasis Digital yang Dibangun			
			Lokasi Pembangunan jaringan Fiber Optik					Iklan Layanan Masyarakat Publikasi Cagar Budaya Situs Kerto Pleret	1 Paket		
			Jumlah CCTV monitoring keamanan					Internet untuk Padukuhan	24 Padukuh an		
			Lokasi Pemeliharaan Penanda Keistimewaan					Pemeliharaan Aplikasi Penanda di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Aplikasi		
			Pemeliharaan jaringan Fiber optik					Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Paket		
			Pemeliharaan jaringan internet	3				Pemeliharaan Jaringan Fiber Optik di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Paket		
			Pemeliharaan CCTV monitoring keamanan	10				Pemeliharaan Jaringan Internet dan Wifi di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Paket		
			Jumlah Publikasi Penanda Keistimewaan	1				Pemeliharaan Penanda Keistimewaan di Makam Raja Mataram Imogiri dan Makam Raja Mataram Kotagede	2 Penanda		
			Pemberdayaan KIM	1							
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Bantul	Sasaran Program : Terwujudnya sistem administrasi perantoran yang akuntabel, tertib dan lancar			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Bantul	Sasaran Program: Terwujudnya sistem administrasi perantoran yang akuntabel, tertib dan lancar			
			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90	Rp8.329.204.570			Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	90	Rp 7.895.751.328,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
X XX 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya laporan capaian kinerja keuangan, data serta bahan evaluasi untuk akuntabilitas Perangkat Daerah			
			Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Rp108.854.328			Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Rp 24.367.500,00	
X XX 01 201 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Rp10.036.950	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Rp 9.850.000,00	
X XX 01 201 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Rp98.817.378	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Rp 14.517.500,00	
X XX 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Terwujudnya Administrasi Keuangan perangkat daerah yang akuntabel			
		Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	Rp6.044.523.304			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	100	Rp 6.807.280.946,00	
X XX 01 202 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	Rp5.919.323.304	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	46	Rp 6.650.980.946,00	
X XX 01 202 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp115.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Rp 152.220.000,00	
X XX 01 202 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	18	Rp10.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	18	Rp 4.080.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD					eran SKPD			
X XX 01 203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya tertib administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100	Rp5.000.000			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi BMD pada Perangkat Daerah	100	Rp 4.037.500,00	
X XX 01 203 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Rp5.000.000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Rp 4.037.500,00	
X XX 01 204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya tertib Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	Rp4.000.000			Capaian Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100	Rp0	
X XX 01 204 07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Rp4.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	Rp0	Sudah tidak ada lagi retribusi menara telekomunikasi.
X XX 01 205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat	100	Rp94.402.780		Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	Rp 19.960.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Daerah								
X XX 01 205 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Rp85.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12	Rp 19.960.000,00	
X XX 01 205 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Rp9.402.780	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bantul	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	Rp0	
X XX 01 206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terlaksananya tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Terlaksananya tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	Rp879.432.460			Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	100	Rp 333.789.522,00	
X XX 01 206 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	Rp13.587.308	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13	Rp 11.984.690,00	
X XX 01 206 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Rp247.090.266	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Rp 99.800.000,00	
X XX 01 206 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	Rp46.101.332	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	Rp 18.476.732,00	
X XX 01 206 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33	Rp81.044.111	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33	Rp 0	
X XX 01 206 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp53.342.556	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Rp 3.862.100,00	
X XX 01 206 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	Rp7.167.641	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3	Rp 4.500.000,00	
X XX 01 206	Fasilitasi Kunjungan	Kab.	Jumlah Laporan Fasilitasi	12	Rp9.500.000	Fasilitasi Kunjungan	Kab.	Jumlah Laporan Fasilitasi	12	Rp 7.865.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
08	Tamu	Bantul	Kunjungan Tamu			Tamu	Bantul	Kunjungan Tamu			
X XX 01 206 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp372.195.752	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Rp 179.608.500,00	
X XX 01 206 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Rp5.400.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Rp 4.037.500,00	
X XX 01 206 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Rp50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	Rp 3.655.000,00	
			Sasaran Kegiatan : Terpenuhiannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Sasaran Kegiatan: Terpenuhiannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X XX 01 207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Rp10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Rp. 0	
X XX 01 207 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Rp10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	0	Rp. 0	
X XX 01 208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan : Terpenuhiannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Sasaran Kegiatan: Terpenuhiannya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp505.710.299			Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Rp 338.815.860,00	
X XX 01 208 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp34.156.609	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Rp 7.236.000,00	
X XX 01 208 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Rp36.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12	Rp 30.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Air dan Listrik yang Disediakan					Disediakan			
X XX 01 208 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp53.715.364	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Rp 24.971.220,00	
X XX 01 208 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp381.838.326	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Rp 276.608.640,00	
X XX 01 209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Sasaran kegiatan : Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Sasaran kegiatan: Terpeliharanya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Rp687.281.399			Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Rp 367.500.000,00	
X XX 01 209 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	Rp419.741.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17	Rp 214.150.000,00	
X XX 01 209 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	Rp167.823.430	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186	Rp 89.700.000,00	
X XX 01 209 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Rp99.716.569	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bantul	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Rp 63.650.000,00	
	JUMLAH				Rp24.183.536.305					Rp30.237.677.324,00	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan masyarakat, usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi inas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8

Usulan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Para Pemangku
Kepentingan/Masyarakat Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/ Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Kalurahan Sabdodadi, Kab. Bantul	PIK
2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/ Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar	1	Tirtosari, Kab. Bantul	PIK

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan	
	Informasi Masyarakat		di Dinas Kominfo			
3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/ Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2	Benyo, Sendangsari, Pajangan, Bantul, Kab. Bantul	PIK
4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/ Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Karangtaruna Aneka Krida Gilangharjo, Jalan Samas Km2, Gilangharjo, Pandak, Bantul, Kab. Bantul	PIK
5	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/ Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Kalurahan Wonokromo, Kab. Bantul	PIK
6	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK/ Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Bantul	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1	Karang Taruna, Kab. Bantul	PIK

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/ *quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan aplikasi informatika
2. Meningkatkan jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
3. Meningkatkan Keamanan Siber dan Sandi di Lingkungan Pemerintah Daerah
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat
5. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan

Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah		Indeks Pemerintah Digital	Angka	n/a	n/a	1.6
		Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informatika	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	Indeks	84,38	84,50	84,75
			Tingkat kematangan keamanan siber	Indeks	n/a	n/a	1,6

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			pemerintah digital				
		Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik	Nilai Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Indeks	3,25	3,25	3,27

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan/subkegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bantul

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	4.037.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	19.960.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	19.960.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		85.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		36.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	24.971.220,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		65.718.054,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	276.608.640,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Dinas Komunikasi dan Informatika		423.840.543,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				20 Permohonan	36.475.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Bantul		81.435.973,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	257.400.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Bantul		446.030.900,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				12 Media	597.587.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Masyarakat Kabupaten Bantul		908.644.930,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan pembangunan/pengembangan aplikasi Tingkat kematangan layanan jaringan intra pemerintah	-			1,60 Angka 1,6 Angka	17.148.993.560,00						-	10.715.991.378,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah</i>				1 Dokumen	229.995.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul		155.262.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas</i>				1 Dokumen	130.667.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Perangkat Daerah, Kapanewon, Kalurahan di Kabupaten Bantul		150.277.546,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						329.750.000,00							251.642.187,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah</i>	-			100 % 100,00 %	329.750.000,00						-	251.642.187,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REN STRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data yang dapat berbagi pakai	-			100 %	329.750.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-	-	251.642.187,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				80 %	179.500.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		136.836.719,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral				80 %	150.250.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	-		114.805.468,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						1.384.949.436,00							2.508.509.884,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-			96,50 %	1.384.949.436,00						-	2.508.509.884,00	

[illegible]

[illegible]

			Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun				5 Objek	2.453.096.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Padukuhan dan Satuan Ruang Strategis Kabupaten Bantul		5.981.506.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H							30.237.677.324,00							29.883.998.190,00	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025, diolah

BAB V.

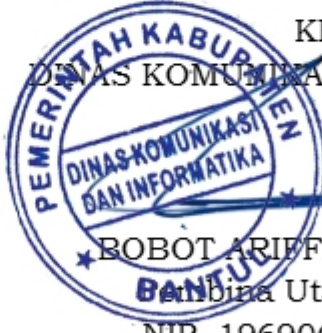
PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

★ BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T., M.T.
Bina Utama Muda, IV/c
NIP. 196906191996031003



BAB V. PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.



BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH